

ABSTRAKSI

Muhammad Syukron HAM "*Pelaksanaan Pasal 126 Tentang Pelimpahan Wewenang, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Di Pemerintahan Kota Bekasi*"

Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 120 dan 126 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan *kecamatan* sebagai unsur perangkat daerah kabupaten/kota, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka kepadanya harus dilimpahi wewenang

Dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat, menurut ketentuan ayat (7) pasal 126 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah, *pertama* untuk mengetahui pelaksanaan pasal 126 tentang pelimpahan wewenang UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di Pemerintahan Kota Bekasi, *kedua* untuk mengetahui kendala apa saja yang ada dalam pelaksanaan pasal 126 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di Pemerintahan Kota Bekasi, *ketiga* untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode kasus yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala sosial atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi adanya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat. Selain itu, penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum yang sedang berlaku. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yuridis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder. Sementara teknik pengumpulan data yang penulis tempuh adalah studi literatur dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara.

Data yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal 126 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat di Pemerintahan Kota Bekasi dijabarkan dengan adanya Perda dan Keputusan Walikota. Namun, dalam dua macam peraturan perundang-undangan tersebut ditemukan adanya kekurangan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pasal 126 yang mengatur pelimpahan wewenang Walikota kepada Camat, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di Pemerintahan Kota Bekasi berjalan tidak sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena adanya kekurangan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat. Kekurangan yang dimaksud adalah tidak terperincinya tugas-tugas atau wewenang apa saja yang dilimpahkan